PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2025

	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	No. SOP	08/BKAD-AKLAP/SOP/2025
		Tanggal Pembuatan	01 SEPTEMBER 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	
		Disyahkan Oleh	Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Feri Irawan, SE, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19751015 199703 1 001
		Judul SOP	**Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang- Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir; 9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 73 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.	1. Memiliki Kewenangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Mengetahui Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui Kebijakan Akuntansi
Keterkaitan :	**Peralatan /Perlengkapan :**
1. SOP Surat Masuk/Keluar 2. SOP Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran 3. SOP Akuntansi Koreksi Kesalahan	ATK, Komputer/Laptop, Printer, Jaringan Internet, SIPD
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan :**
Apabila LKPD tidak disusun maka akan menghambat proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan opini yang merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan keuangan negara/daerah.	Buku kas, SPJ Fungsional, dokumen sumber transaksi, dan rekening koran bank

SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

No	Prosedur	Pelaksana											Mutu Baku			Ket
		BPK	Inspektorat	KDH/Bupati	Sekda	Asisten	Ka. BKAD	Sekretaris	Kabid	Kasubbid	Tim LK	SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Surat ditujukan kepada SKPD/BUMD tentang Permintaan Data SPJ Pengeluaran dan Penerimaan												Disposisi	1 hari	Surat Permintaan Data SPJ Pengeluaran dan	
2	Paraf/Penandatangan Surat Permintaan Data SPJ Pengeluaran dan Penerimaan												Disposisi	1 hari	Surat Permintaan Data SPJ Pengeluaran dan	
3	Penyampaian Surat Permintaan Data SPJ Pengeluaran dan Penerimaan kepada SKPD/BUMD												Surat Permintaan Data SPJ Pengeluaran dan Penerimaan	2 hari	Tanda terima surat	
4	Menginstruksikan kepada Kasubbid dan Tim LK untuk melakukan rekonsiliasi data Pengeluaran dan Penerimaan SKPD/BUMD dan BMD												Dokumen kelengkapan Laporan Keuangan SKPD	3 hari	Laporan Keuangan SKPD yang telah direview	
5	Melakukan rekonsiliasi BMD dengan Bidang Pengelolaaan BMD												Dokumen BMD	1 hari	Dokumen BMD yang telah direview	
6	Melakukan asistensi/pengujian terhadap data pengeluaran dan Penerimaan SKPD/BUMD dan BMD												Resume kesuaian data, identifikasi selisih,penjelasan selisih Data Keuanagan SKPD, BUMD dan BMD	1 hari	Laporan Keuangan SKPD dan BMD yang telah direview	
7	Jika data pengeluaran dan penerimaan SKPD/BUMD terkait kesuaian data, identifikasi selisih,penjelasan selisih masih terdapat kesalahan akan dikembalikan ke SKPD /BUMD									Ya		Tidak	Resume kesuaian data, identifikasi selisih,penjelasan selisih Data Keuanagan SKPD, BUMD dan BMD	1 hari	Laporan Keuangan SKPD dan BMD yang telah direview	
8	Setelah data sesuai terkait selisih diidentifikasi, dijelaskan dan direview oleh Tim LK maka disusun LKPD Unaudited												Laporan Keuangan SKPD dan BMD yang telah direview	1 hari	LKPD Unaudited	
9	Menyerahkan LKPD Unaudited untuk disahkan kepada Kepala BKAD												Laporan Keuangan SKPD dan BMD yang telah direview	1 hari	LKPD Unaudited	

No	Prosedur	Pelaksana											Mutu Baku			Ket
		BPK	Inspektorat	KDH/Bupati	Sekda	Asisten	Ka. BKAD	Sekretaris	Kabid	Kasubbid	Tim LK	SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Kepala BKAD selaku SKPKD/PPKD menerima LKPD Unaudited untuk disampaikan kepada KDH/Bupati melalui Sekretaris Daerah												LKPD Unaudited	1 hari	LKPD Unaudited, Surat Pengantar	
11	Sekretaris Daerah menerima LKPD Unaudited dan disampaikan kepada KDH/Bupati untuk disahkan												LKPD Unaudited	1 hari	LKPD Unaudited, Surat Pengantar	
12	KDH/Bupati menerima LKPD Unaudited dari SKPKD/PPKD melalui Sekretaris Daerah untuk disahkan dan diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan												LKPD Unaudited	1 hari	LKPD Unaudited, Surat Pengantar	
13	Badan Pemeriksa Keuangan menerima LKPD Unaudited dari KDH/Bupati untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan atas LKPD tersebut												LKPD Unaudited	3 hari	LKPD Unaudited, Surat Pengantar	
14	KDH/Bupati menerima hasil pemeriksaan BPK												LKPD Unaudited	60 hari	Laporan Pemeriksaan Atas LKPD Audited	
15	Inspektorat menerima LKPD untuk rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan BPK												Laporan Pemeriksaan Atas LKPD Audited	1 hari	Laporan Pemeriksaan Atas LKPD Audited	
16	Menyelesaikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau												Laporan Pemeriksaan Atas LKPD Audited	3 hari	Tindak lanjut atas Pemeriksaan Atas LKPD Audited	
17	Kepala BKAD selaku SKPKD/PPKD menerima LKPD Audited												Laporan Pemeriksaan Atas LKPD Audited	3 hari	LKPD Audited	

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,

Feri Irawan, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19751015 199703 1 001